Per 8 April 2017, Kepengurusan Paspor Umron dan Haji Plus Harus Dapat Rekom Kemenag

Senin, 17 April 2017

Mulai 8 April 2017, calon jemaah umrah dan haji khusus wajib mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebelum mengurus paspor di kantor Imigrasi. Aturan ini bertujuan menekan maraknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara non-prosedural, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi TKI dan lingkungan sosialnya. Rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama. Calon jemaah dapat mengajukan rekomendasi sendiri atau melalui PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan akan memberikan rekomendasi berdasarkan data PPIU/PIHK yang terdaftar di Kemenag. Pihaknya akan memeriksa keabsahan travel umroh dan hanya memberikan rekomendasi kepada travel yang terdaftar di Kemenag Kabupaten Pasuruan. Sampai saat ini, hanya satu travel, yaitu Rosana, yang terdaftar di Kemenag Kabupaten Pasuruan. Calon jemaah yang ingin mengurus paspor harus menunjukkan surat rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Pasuruan, dan tanpa rekomendasi tersebut, mereka tidak akan dapat mengurus paspor di imigrasi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan 300 surat rekomendasi kepada calon jemaah umrah dan haji khusus, baik yang berangkat melalui travel di Pasuruan maupun daerah lain. Calon jemaah dari Kabupaten Pasuruan, meskipun menggunakan travel dari daerah lain, harus tetap meminta rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Aturan ini berlaku untuk semua calon jemaah umrah dan haji khusus yang berangkat dari Kabupaten Pasuruan, tidak peduli dari travel mana mereka berangkat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan siap menjalankan amanah baru ini dan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua calon jemaah umrah dan haji khusus dari Kabupaten Pasuruan berangkat dengan prosedur yang benar. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh tenaga kerja Indonesia yang non-prosedural dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan para jemaah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.